

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Perda Provinsi Jawa Tengah No.7 Tahun 2008 dan Pergub Jawa Tengah No.85 Tahun 2008 mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Badan Kesbang Pol dan Linmas adalah merupakan institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri serta Perlindungan Masyarakat. Keberadaan SKPD di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat sangat strategis dalam membangun, menjaga dan memelihara serta menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, sekaligus menjadi penggerak dinamika masyarakat yang demokratis sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar berkesinambungan dan terciptanya iklim sejuk bagi masyarakat di Jawa Tengah.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, aman dan nyaman diperlukan stabilitas daerah yang kondusif, adanya upaya pembangunan dan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, maupun pengelolaan penanganan Kamtibmas yang menjamin terlindunginya sendi kehidupan masyarakat dari ancaman dan konflik.

## **B. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

## **C. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada public atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

#### **D. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Adapun fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras**

##### **a. Susunan Kepegawaian**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Jawa Tengah, pada bagian ketiga paragraf 2 pasal 22 disebutkan bahwa Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Subbagian Program.
  - b. Subbagian Keuangan.
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahkan :
  - a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
  - b. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
4. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan :
  - a. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Masyarakat.
  - b. Subbidang Ketahanan Ekonomi.
5. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
  - a. Subbidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik.
  - b. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
  - a. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat.;
  - b. Subbidang Bina Perlindungan Masyarakat.

b. Sarana dan Prasarana

Di samping struktur organisasi tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya aparatur yang mendukung dalam terselenggaranya seluruh program dan kegiatan dari Januari - Desember 2014 sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai keseluruhan sebanyak 120 orang, dengan komposisi :
  - a. PNS sebanyak 106 orang.

- b. Pegawai Honorer sebanyak 2 orang.
  - c. Harlep/tenaga kontrak sebanyak 12 Orang
2. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 17 orang, terdiri dari :
- a. Kepala Badan : 1 orang
  - b. Sekretaris : 1 orang
  - c. Kepala Bidang : 4 orang
  - d. Kepala Subbagian : 3 orang
  - e. Kepala Subbidang : 8 orang
3. Jumlah PNS berdasarkan golongan
- a. Golongan IV : 11 orang
  - b. Golongan III : 81 orang
  - c. Golongan II : 21 orang
  - d. Golongan I : 0 orang
4. Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan
- a. S D : - orang
  - b. S L T P : 7 orang
  - c. S L T A : 33 orang
  - d. Diploma/Sarmud : 3 orang
  - e. Sarjana/S 1 : 47 orang
  - f. Pasca Sarjana/S 2 : 16 orang

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat

Pada tahun 2014 sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Tahun 2014-2018, Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah memfokuskan pada pencapaian sasaran utama yaitu:

- a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
- b. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan nasional di masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional.
- d. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional.
- e. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya dan etika politik yang demokratis.
- f. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik.
- g. Meningkatnya kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik
- h. Meningkatnya stabilitas masyarakat yang kondusif yang mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat
- i. Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

- j. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia satuan LINMAS/RATIH dalam menjalankan fungsi perlindungan masyarakat.
- k. Meningkatnya sinergisitas lembaga dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparaturnya pemerintah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran strategis diatas, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dalam rangka mendukung Visi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah yaitu **"Terwujudnya kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang kondusif, demokratis dan partisipatif "**.

Pencapaian sasaran strategis dalam upaya mewujudkan Visi yang di maksud maka pada tahun 2014 Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 12 program dan 94 kegiatan.

#### **A. Rencana Strategik**

Rencana stratejik pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat secara spesifik memuat tentang hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang mungkin timbul. Visi, misi, indikator kinerja, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan disusun dalam rencana stratejik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah yang bersifat indikatif dalam rangka melaksanakan komitmen Gubernur **"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"** dalam upaya penciptaan situasi yang kondusif, demokratis, dan terlindunginya masyarakat Jawa Tengah dari gangguan kamtibmas, terorisme dan potensi konflik.

Untuk mewujudkan rencana stratejik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat perlu dirumuskan tujuan akhir dan strategi pencapaiannya dengan memperhatikan Visi dan Misi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah yaitu :

### **a. Visi**

Visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah : **“Terwujudnya kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang kondusif, demokratis dan partisipatif “**

### **b. Misi**

Untuk mewujudkan Visi, ditentukan Misi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat.
3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.
5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

### **c. . Tujuan**

Guna melaksanakan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan yang akan di capai oleh Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Meningkatkan kemandirian dan dinamika partai politik, ormas/LSM dan lembaga pemerintah
- b. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kewaspadaan nasional.
- c. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan kewaspadaan nasional.



- d. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik yang demokratis
- e. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik.
- f. Meningkatkan kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik.
- g. Meningkatkan stabilitas masyarakat yang kondusif yang mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat
- h. Meningkatkan peran lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, demokratis dan partisipatif.

#### **d. Sasaran**

Untuk mendapatkan hasil yang terukur, spesifik, dan rasional dari tujuan maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu:

- a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat, dengan indikator sebagai berikut :
  - 1. Persentase peningkatan pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap 4 pilar kebangsaan
  - 2. Persentase jumlah kegiatan pendidikan politik, ideology dan wasbang pada urusan poldagri
  - 3. Persentase jumlah peserta atau masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan politik, ideologi dan wawasan kebangsaan.
  - 4. Berkurangnya jumlah ormas atau kelompok masyarakat yang bertujuan ingin mengganti Pancasila
- b. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan nasional di masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan indikator sebagai berikut :
  - 1. Berkurangnya jumlah konflik sosial di masyarakat.

2. Jumlah peningkatan pembauran antar etnis di Indonesia.
- c. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional, dengan indikator sebagai berikut :
    1. Berkurangnya jumlah gangguan keamanan dan konflik sosial
    2. Persentase Jumlah peserta atau masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kewaspadaan nasional
  - d. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional, dengan indikator sebagai berikut :
    1. Jumlah Kab/Kota yang membentuk : KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI.
    2. Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, FPWK, di Jawa Tengah
  - e. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik yang demokratis, dengan indikator sebagai berikut :
    1. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah
    2. Turunnya praktek money politics (politik uang) di masyarakat
    3. Persentase kegiatan penguatan etika dan budaya politik demokratis
    4. Persentase jumlah peserta dan kegiatan peningkatan budaya dan etika demokrasi
    5. Tersusunnya modul pendidikan politik etika dan budaya demokrasi
    6. Tersusunnya modul pendidikan politik 4 pilar kebangsaan
  - f. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik, dengan indikator sebagai berikut :
    1. Meningkatnya Prosentase partisipasi politik dalam pemilu dan pemilukada
  - g. Meningkatnya kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik, dengan indikator sebagai berikut :
    1. Berkurangnya angka konflik politik dalam pemilu dan pemilukada
    2. Meningkatnya peran partai politik di daerah

3. Terwujudnya kader-kader pendidikan politik dan wasbang di masyarakat.
- h. Meningkatnya stabilitas masyarakat yang kondusif yang mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat, dengan indikator sebagai berikut :
1. Turunnya angka penyakit masyarakat seperti : kriminalitas, NAPZA, miras
  2. Berkurangnya angka konflik SARA, sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat
  3. Meningkatnya kecintaan dan pengamalan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa.
  4. Meningkatnya tingkat toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
  5. Meningkatnya ketahanan sosial budaya dan ekonomi masyarakat
- i. Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, dengan indikator sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintahan
  2. Terlaksananya SOP dan SPM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- j. Meningkatnya sinergitas lembaga dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat, dengan indikator sebagai berikut :
1. Terjalinnnya kerjasama dengan berbagai pihak atau *stakeholder* terkait pemecahan masalah-masalah strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat

k. Meningkatnya kapasitas SDM satuan Linmas/Ratih dalam menjalankan tugas, dengan indikator sebagai berikut :

1. Rasio Jumlah Linmas/Ratih dengan Jumlah Penduduk Jawa Tengah

## B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014

Dalam RKT tahun 2014 Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah, sasaran strategis, indikator dan target yang hendak di capai adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan	1. Data harian situasi daerah 2. Persentase kejadian menonjol 3. Persentase kondusifitas wilayah 4. Pendataan dan pengawasan orang asing 5. Persentase menurunnya tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa/penyampaian aspirasi oleh kelompok masyarakat 6. Jumlah fasilitasi pemberdayaan FKDM 7. Persentase ruang publik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan Masyarakat 8. Pengamanan Kunjungan VIP/VVIP 9. Data kerawanan Jawa Tengah 10. Data perkembangan ekonomi dan kerawanan Sosial ekonomi	365 hari 100% 100% 15.000 Orang 15% 26 kali 100% 36 kali 35 Kab/Kota 35 Kab/Kota

Meningkatnya Pemahaman Ideologi Negara bagi Aparatur Pemerintah dan Elemen Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah elemen masyarakat yang paham ideologi Negara</li> <li>2. Jumlah Pendidik yang memahami nilai-nilai Pancasila</li> <li>3. Jumlah kalangan PTN/PTS/Pelajar yang memahami nilai-nilai Pancasila</li> <li>4. Jumlah Aparatur dan Elemen masyarakat yang menghayati Pancasila</li> </ol>	<p>100 Orang</p> <p>30 Orang</p> <p>200 Orang</p> <p>150 Orang</p>
Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam rangka bela Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah elemen masyarakat yang memahami Ideologi Negara, berbangsa dan bernegara</li> <li>2. Jumlah masyarakat yang berkomitmen thd bela negara</li> </ol>	<p>200 Orang</p> <p>200 Orang</p>
Meningkatnya kesadaran bela negara serta kokohnya persatuan dan kesatuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Mahasiswa PTN/PTS/Pelajar dan Ormas yang memelihara dan mengembangkan seni dan budaya daerah</li> <li>2. Jumlah Toga, Toma, generasi muda yang memelihara kerukunan antar umat beragama serta penghayat kepercayaan</li> <li>3. Jumlah Toga, Toma dan Tokoh Penghayat kepercayaan yang ikut memantapkan kerukunan dan harmonisasi komponen bangsa</li> </ol>	<p>280 Orang</p> <p>120 Orang</p> <p>130 Orang</p>
Meningkatnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pengkaji sosial kemasyarakatan</li> <li>2. Jumlah peserta dari ormas yang mandiri dan dinamis</li> <li>3. Jumlah etnis yang berhubungan harmonis dgn Negara</li> <li>4. Jumlah Ormas Aktif</li> <li>5. Jumlah LSM</li> <li>6. Jumlah kegiatan pembinaan LSM/Ormas dan OKP</li> </ol>	<p>120 Orang</p> <p>120 Orang</p> <p>240 Orang</p> <p>400</p> <p>390</p> <p>10 kali</p>
Meningkatnya Kesadaran dan pemahaman aparatur pemerintah dan elemen masy dalam pembangunan bidang Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemuda dan pelajar yang mengerti etika dan budaya politik</li> <li>2. Jumlah ormas/LSM/Toma/Toga dalam penguatan peran politik</li> <li>3. Jumlah aparatur pemerintah yang memahami pembangunan kelembagaan politik</li> <li>4. Jumlah anggota parpol yang memahami pembangunan bidang politik</li> <li>5. Jumlah elemen masyarakat yang menguat potensi politik</li> </ol>	<p>250 orang</p> <p>250 Orang</p> <p>250 Orang</p> <p>250 Orang</p> <p>150 orang</p>

	6. Jumlah elemen masyarakat yang mengalami peningkatan budaya dan etika politik 7. Jumlah pemantauan dan pendataan parpol di daerah 8. Jumlah aparaturnya profesional yang menangani Pilkada di Jateng 9. Indeks Demokrasi Indonesia di Jateng 10. Jumlah orpol 11. Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah 12. Persentase pemilih dalam pilkada Jateng 13. Persentase Pilkada aman dan demokratis 14. Jumlah kegiatan sosialisasi Pilkada	250 orang  35 Kab/Kota  200 Orang  75% 38 35 kali 80% 100% 20 kali
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Linmas dalam pengamanan Lingkungan	1. Jumlah anggota Linmas yang telah dibina dlm mengamankan lingkungan 2. Jumlah komandan Satlinmas yang terampil 3. Jumlah Anggota Satlinmas dan Ratih yang terampil dalam penyelamatan di air 4. Jumlah monitoring dan evaluasi pemberdayaan Satlinmas 5. Jumlah anggota Menwa Mahardipa yang Sadar bela negara	875 Orang  110 Orang 110 Orang  35 Kab/Kota  360 Orang
Meningkatnya Stabilitas Keamanan Keamanan Jateng Dalam Pemilu 2014	1. Jumlah monitoring dan fasilitasi dukungan PAM Pemilu 2. Jumlah Anggota Linmas yang di tingkatkan kemampuan- Dan kesiapannya dalam PAM Pemilu 2014 3. Jumlah PAM Swakarsa yang ditingkatkan kemampuannya Dalam pengamanan lingkungan	35 Kab/Kota 6.375 Orang  50 Orang
Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan Anggota Hansip/Linmas	Jumlah personil dalam dikmas Hansip/Linmas	1100 Orang

### C. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 yang telah di sepakati antara Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Jumlah Data harian situasi daerah	365 hari	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b> 1. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesbang Pol dan Linmas 2. Kominda 3. FGD Analisi Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan 4. Pengawasan Orang Asing 5. Koordinasi Pengamanan Wilayah 6. Koordinasi Penciptaan Kondusifitas Daerah 7. Pembinaan Sosial Politik 8. Pengkajian dan Pemantauan Dampak Perekonomian 9. Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah 10. Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama Antar Daerah Kab/Kota dan Daerah Perbatasan Dalam Rangka Peningkatan Keamanan 11. Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik 12. Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi 13. Peningkatan Demokratisasi dan HAM bagi	<b>8,282,030,000</b>
	2. Persentase laporan kejadian menonjol	100%		2,690,000,000
	3. Persentase kondusifitas wilayah	100%		322,040,000
	4. Pendataan dan Pengawasan orang asing	15.000 Orang		281,785,000
	5. Persentase menurunnya tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa/penyampaian aspirasi oleh kelompok masyarakat	15%		201,275,000
	6. Jumlah fasilitasi pemberdayaan FKDM	26 kali		322,040,000
	7. Persentase ruang publik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan masyarakat	100%		166,000,000
	8. Pengamanan Kunjungan VVIP/VIP	36 Kali		550,000,000
	9. Data Kerawanan Jawa Tengah	35 Kab/Kota		281,785,000
	10. Data perkembangan ekonomi dan kerawanan sosial ekonomi			322,040,000

			Kesejahteraan Rakyat	
			14. Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan	191,000,000
			15. Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme	166,000,000
			16. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal	457,500,000
			17. Penguatan Nilai-Nilai Sejarah dan Kebangsaan	197,500,000
			18. Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme	197,500,000
			19. FGD Pengkajian Patologi Sosial	83,000,000
			20. Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi	166,000,000
			21. Dialog dan Sosialisasi P4GN	150,000,000
			22. Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	150,000,000
			23. Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	250,000,000
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>3,279,500,000</b>
			1. Fasilitasi Pemberdayaan FKDM	290,500,000
			2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial	249,000,000



			3. Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik dalam Rangka Ketahanan Masyarakat	2,740,000,000
Meningkatnya Pemahaman Ideologi Negara bagi Aparatur Pemerintah dan Elemen Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah elemen masyarakat yang paham ideologi Negara</li> <li>2. Jumlah Pendidik yang memahami nilai-nilai Pancasila</li> <li>3. Jumlah kalangan PTN/PTS/Pelajar yang memahami nilai-nilai Pancasila</li> <li>4. Jumlah Aparatur dan Elemen masyarakat yang menghayati Pancasila</li> </ol>	<p>100 Orang</p> <p>30 Orang</p> <p>200 Orang</p> <p>150 Orang</p>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kesadaran Bela Negara</li> <li>2. Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara</li> <li>3. Peningkatan Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring/Validitasi Data Perkembangan Faham Lain</li> <li>4. Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat dalam Kerangka Peningkatan Wasbang</li> <li>5. Pemeliharaan dan Pengembangan Seni serta Budaya Daerah</li> </ol>	<p><b>3,389,750,000</b></p> <p>317,000,000</p> <p>269,750,000</p> <p>265,500,000</p> <p>239,000,000</p> <p>369,750,000</p>
Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam rangka bela negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah elemen masyarakat yang memahami berbangsa dan bernegara</li> <li>2. Jumlah masyarakat yang berkomitmen thd bela negara</li> </ol>	<p>200 Orang</p> <p>200 Orang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Antar Penghayat Kepercayaan</li> <li>7. Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta akulturasi Budaya</li> <li>8. Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan</li> <li>9. Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis</li> <li>10. Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi</li> </ol>	<p>374,000,000</p> <p>224,000,000</p> <p>249,000,000</p> <p>334,750,000</p> <p>249,000,000</p>

			<p>Kalangan PTN/PTS dan Pendidik</p> <p>11. Peningkatan Pemahaman Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa 166,000,000</p> <p>12. Peningkatan Pemahaman Pilar Kebangsaan 166,000,000</p> <p>13. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 166,000,000</p>	
Meningkatnya kesadaran bela negara serta kokohnya persatuan dan kesatuan	<p>1. Jumlah Mahasiswa PTN/PTS/Pelajar dan Ormas yang memelihara dan mengembangkan seni dan budaya daerah 280 Orang</p> <p>2. Jumlah Toga, Toma, generasi muda yang memelihara kerukunan antar umat beragama serta penghayat kepercayaan 120 Orang</p> <p>3. Jumlah Toga, Toma dan Tokoh Penghayat kepercayaan yang ikut memantapkan Kerukunan dan harmonisasi komponen bangsa 130 Orang</p>		<p><b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b></p> <p>1. Peningkatan Apresiasi Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah 166,000,000</p> <p>2. Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat 239,000,000</p> <p>3. Pendayagunaan Potensi Ormas 399,000,000</p> <p>4. Pemeliharaan Hubungan Etnisitas dengan Negara 207,500,000</p> <p>5. Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar 447,500,000</p>	<p><b>1,459,000,000</b></p>
Meningkatnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat secara optimal	<p>1. Jumlah pengkaji sosial kemasyarakatan 120 Orang</p> <p>2. Jumlah peserta dari ormas yang mandiri dan dinamis 120 Orang</p> <p>3. Jumlah etnis yang berhubungan harmonis dgn Negara 240 Orang</p>		<p><b>Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat</b></p> <p>1. Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga 385,500,000</p> <p>2. Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintah 498,000,000</p>	<p><b>3,573,000,000</b></p>

	4. Jumlah Ormas Aktif	400	3. Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan	399,000,000
Meningkatnya Kesadaran dan pemahaman aparatur pemerintah dan elemen masy dalam pembangunan bidang politik	5. Jumlah LSM	390	Parpol	
	6. Jumlah kegiatan pembinaan LSM/Ormas dan OKP	10 kali	4. Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat	572,500,000
	1. Jumlah pemuda dan pelajar yang mengerti etika dan budaya politik	250 orang	5. Penguatan Sistem dan Implementasi Pilkada	207,500,000
	2. Jumlah ormas/LSM/Toma/Toga dalam penguatan peran politik	250 Orang	6. FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat	290,500,000
	3. Jumlah aparatur pemerintah yang memahami pembangunan kelembagaan politik	250 Orang	7. Peningkatan Penanganan Dampak Poltik Pilkada	249,000,000
	4. Jumlah anggota parpol yang memahami pembangunan bidang politik	200 Orang	8. Pemantauan dan Pendataan Parpol Daerah	249,000,000
	5. Jumlah elemen masyarakat yang menguat potensi politiknya	150 orang	9. Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat	307,000,000
	6. Jumlah elemen masyarakat yang mengalami peningkatan budaya dan etika politik	250 orang	10. Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat	249,000,000
	7. Jumlah pemantauan dan pendataan parpol di daerah	35 Kab/Kota	11. Pendidikan Politik Bagi Perempuan	166,000,000
	8. Jumlah aparatur profesional yang menangani Pilkada di Jateng	200 Orang		
9. Indeks Demokrasi Indonesia di Jateng	75%			
10. Jumlah orpol	38			

	11. Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah	35 kali		
	12. Persentase pemilih dalam pilkada Jateng	80%		
	13. Persentase Pilkada aman dan demokratis	100%		
	14. Jumlah kegiatan sosialisasi Pilkada	20 kali		
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Linmas dalam pengamanan lingkungan	1. Jumlah anggota Linmas yang telah dibina dlm mengamankan lingkungan 2. Jumlah komandan Satlinmas yang terampil 3. Jumlah Anggota Satlinmas dan Ratih yang terampil dalam penyelamatan di air 4. Jumlah monitoring dan evaluasi pemberdayaan Satlinmas 5. Jumlah Anggota Linmas yang sadar bela negara	875 Orang 110 Orang 110 Orang 35 Kab/Kota 360 Orang	<b>Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Rakyat Terlatih (Ratih)</b> 1. Peningkatan Keterampilan Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas 2. Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng 3. Peningkatan Keterampilan PAM lingkungan bagi Komandan Satlinmas 4. Peningkatan Keterampilan Penyelamatan di Air	<b>13,234,600,000</b> 249,000,000 332,000,000 300,000,000 589,100,000
Meningkatnya stabilitas keamanan Jateng dalam Pemilu 2014	1. Jumlah monitoring dan fasilitasi dukungan PAM Pemilu 2014 2. Jumlah anggota Satlimas yang ditingkatkan kemampuan dan kesiapannya dalam PAM Pemilu 2014 3. Jumlah PAM swakarsa yang ditingkatkan kemampuan dalam pengamanan lingkungan	35 Kab/Kota 6.375 orang 50 Orang	5. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas 6. Penguatan Kesadaran Bela Negara 7. Peningkatan Keterampilan Pengamanan Swakarsa 8. Peningkatan Keterampilan Satlinmas 9. Orientasi Kesiapan Linmas Dalam Pengamanan 10. Peningkatan Keterampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas 11. Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu 12. Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Kelinmasan	207,500,000 83,000,000 249,000,000 2,000,000,000 6,225,000,000 365,000,000 365,000,000 1,270,000,000

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Hansip/Linmas	Jumlah personil dalam dikmas Hansip/Linmas	1100 Orang	13. Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas Se-Jateng	1,000,000,000
---	--	------------	---	---------------

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel....

**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>NO</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik

2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2014 , Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, terdapat 11 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

**a. Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kesadaran Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kesadaran Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	1. Persentase peningkatan pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap 4 pilar kebangsaan  2. Persentase jumlah kegiatan politik, ideologi dan	80%	80%	100%	80%	100%

	wasbang pada urusan poldagri					
	3. Persentase Jumlah Peserta/masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan politik, ideologi dan wasbang	70%	70%	100%	70%	100%
	4. Berkurangnya jumlah ormas atau kelompok masyarakat Jawa Tengah yang bertujuan ingin mengganti Pancasila	75%	75%	100%	75%	100%
		75%				
			75%	100%	75%	100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kesadaran Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat dapat dicapai telah sesuai dengan target.

Capaian kinerja pada sasaran 1.1, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2014 mampu menyamai tahun 2013. Hal ini disebabkan karena



Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 menetapkan target atau kondisi eksisting sesuai dengan hasil evaluasi akhir Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

**b. Sasaran 1.2** : Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Nasional di Masyarakat Dalam Bingkai NKRI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Nasional di Masyarakat Dalam Bingkai NKRI	1. Berkurangnya jumlah konflik sosial di masyarakat	75%	75%	100%	75%	100%
	2. Jumlah peningkatan pembauran antar etnis di Indonesia	70%	70%	100%	70%	100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Nasional di Masyarakat Dalam Bingkai NKRI dapat dicapai telah sesuai dengan target.

Capaian kinerja pada sasaran 1.2, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2014 mampu menyamai tahun 2013. Hal ini di sebabkan karena

Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 menetapkan target atau kondisi eksisting sesuai dengan hasil evaluasi akhir Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1 dan 1.2, adalah sebesar Rp. 1.433.018.600,- atau 98,22 % dari total pagu sebesar Rp. 1.459.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,78% dari Pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 dan 1.2 tidak terlepas dari dilaksanakan program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah.
2. Kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat.
3. Kegiatan Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan
4. Kegiatan Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara
5. Kegiatan Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar

**c. Sasaran 2.1.** : Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Dini Dalam Rangka Mewujudkan Kewaspadaan Nasional.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Dini Dalam Rangka Mewujudkan Kewaspadaan Nasional	1. Berkurangnya jumlah gangguan keamanan dan konflik sosial	80%	80%	100%	80%	100%
	2. Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kewaspadaan nasional	75%	75%	100%	75%	100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Dini Dalam Rangka Mewujudkan Kewaspadaan Nasional dapat dicapai telah sesuai dengan target.

Capaian kinerja pada sasaran 2.1, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2014 mampu menyamai tahun 2013. Hal ini disebabkan karena Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 menetapkan target atau kondisi eksisting sesuai dengan hasil evaluasi akhir Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

**d. Sasaran 2.2** : Meningkatkan Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini dan Pencegahan Dini Dalam Rangka Mewujudkan Kewaspadaan Nasional.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini dan Pencegahan Dini Dalam Rangka Mewujudkan Kewaspadaan Nasional	1. Persentase Kab/Kota yang membentuk Lembaga : KOMINDA, FKUB, FKDM, FPBI 2. Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan KOMINDA, FKDM, FKUB, FPBI, FPWK di Jawa Tengah	90%	90%	100%	90%	100%
		35	35	100%	100%	100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatkan Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini dan Pencegahan Dini Dalam

Rangka Mewujudkan Kewaspadaan Nasional dapat dicapai telah sesuai dengan target.

Capaian kinerja pada sasaran 2.2, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2014 mampu menyamai tahun 2013. Hal ini di sebabkan karena Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 menetapkan target atau kondisi eksisting sesuai dengan hasil evaluasi akhir Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2.1 dan 2.2, adalah sebesar Rp. 3.111.196.427,-. atau 94,87 % dari total pagu sebesar Rp. 3.279.500.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,13% dari Pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 2.1 dan 2.2 tidak terlepas dari dilaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006)
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial
3. Kegiatan Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat

**e. Sasaran 3.1** : Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Etika dan Budaya Politik Yang Demokratis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian	% Capaian
				%		

				capaian	Tahun 2013	terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Etika dan Budaya Politik Yang Demokratis	1. Meningkatnya IDI Jawa Tengah	75%	66,26%	88,34%	-	80%
	2. Turunnya <i>money politicts</i> di masyarakat	70%	70%	100%	70%	100%
	3. Persentase kegiatan penguatan etika dan budaya politik demokratis	70%	70%	100%	70%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Etika dan Budaya Politik Yang	4. Persentase Jumlah peserta kegiatan peningkatan budaya dan etika demokrasi	75%	75%	100%	75%	100%

Demokratis	5. Tersusunnya modul pendidikan etika dan budaya demokrasi	-	-	-	-	-
	6. Tersusunnya modul pendidikan politik	-	-	-	-	-

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Etika dan Budaya Politik Yang Demokratis dapat dicapai telah sesuai dengan target. Indikator peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2012 (tahun 2013 dan tahun 2014 belum dilakukan perhitungan secara Nasional) di bandingkan dengan Tahun 2011, walaupun secara peringkat mengalami penurunan dari peringkat ketiga Nasional menjadi peringkat enam Nasional. Kemudian untuk indikator penyusunan modul baru dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.

Capaian kinerja pada sasaran 2.1, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2014 mampu menyamai tahun 2013. Hal ini di sebabkan karena Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 menetapkan target atau kondisi eksisting sesuai dengan hasil evaluasi akhir Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

**f. Sasaran 3.2** : Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Setiap Proses Kegiatan Politik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Setiap Proses Kegiatan Politik	1. Persentase Partisipasi Politik dalam Pemilu dan Pemilukada	75%	74%	98,66%	58,64%	90%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Setiap Proses Kegiatan Politik dicapai dengan baik walaupun tidak dapat 100%. Capaian persentase partisipasi politik dalam pemilu dan pemilukada lebih tinggi di bandingkan dengan Tahun 2013.

Penyebab umum tidak tercapainya 100% antara lain :

1. Mobilitas penduduk Jawa Tengah yang tinggi
2. Sebagian penduduk Jawa Tengah masih apatis terhadap proses politik Nasional
3. Surat suara rusak/tertukar.

Alternatif solusi untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat, antara lain :

1. Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat.
2. Peningkatan sistem informasi kependudukan.
3. Penambahan jumlah TPS



4. Pembentukan kader politik di masyarakat

**g. Sasaran 3.3** : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik Masyarakat Yang Demokratis Berlandaskan Etika dan Budaya Politik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik Masyarakat Yang Demokratis Berlandaskan Etika dan Budaya Politik	1. Persentase Berkurangnya angka konflik dalam Pemilu dan Pemilukada	70%	70%	100%	70%	100%
	2. Persentase Meningkatnya peran partai politik di daerah	70%				
	3. Terwujudnya kader-kader pendidikan politik dan wasbang di masyarakat		70%	70%	100%	70%
		-	-	-	-	-

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik Masyarakat Yang Demokratis Berlandaskan Etika dan

Budaya Politik dapat dicapai telah sesuai dengan target. Indikator terwujudnya kader-kader politik dan wasbang di masyarakat baru dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, di harapkan pada tahun 2018 telah terbentuk 1000 kader inti yang masing-masing akan membentuk jaringan-jaringan baru di masyarakat.

Capaian kinerja pada sasaran 3.3, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2014 mampu menyamai tahun 2013. Hal ini di sebabkan karena Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 menetapkan target atau kondisi eksisting sesuai dengan hasil evaluasi akhir Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3.1, 3.2 dan 3.3, adalah sebesar Rp. 3.575.305.180 atau 95,44 % dari total pagu sebesar Rp. 3.746.000.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,56% dari Pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 3.1, 3.2 dan 3.3 tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga.
2. Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintahan.
3. Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Partai Politik.
4. Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat.
5. Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pilkada
6. Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik
7. Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pilkada

8. Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah
9. Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat
10. Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan
11. Kegiatan Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat

**h. Sasaran 4** : Meningkatnya Stabilitas Masyarakat Yang Kondusif Yang Mendukung Terciptanya Ketahanan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Stabilitas Masyarakat Yang Kondusif Yang Mendukung Terciptanya Ketahanan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Turunnya penyakit masyarakat seperti : kriminalitas, NAPZA, Miras	70%	70%	100%	70%	100%
	2. Berkurangnya konflik SARA, Sosbud, dan ekonomi di masyarakat					
	3. Meningkatnya kecintaan dan pengamalan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa	70%	70%	100%	70%	100%

	4. Meningkatnya tingkat toleransi dan kerukunan antar umat beragama	70%	70%	100%	70%	100%
	5. Meningkatnya ketahanan sosial budaya dan ekonomi masyarakat	70%	70%	100%	70%	100%
		75%	75%	100%	70%	100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Stabilitas Masyarakat Yang Kondusif Yang Mendukung Terciptanya Ketahanan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dapat dicapai telah sesuai dengan target.

Capaian kinerja pada sasaran 4, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2014 mampu menyamai tahun 2013. Hal ini di sebabkan karena Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 menetapkan target atau kondisi eksisting sesuai dengan hasil evaluasi akhir Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4, adalah sebesar Rp. 2.255.891.000 atau 83,86% dari total pagu sebesar Rp. 2.690.000.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 16,14% dari Pagu yang ditentukan. Capaian kinerja yang kurang dari 90% di sebabkan antara lain adanya Radiogram Mendagri Nomor T.188.34/1823.D.II, Tanggal 20 Mei 2014 yang isinya Struktur Kominda Di bekukan dan agar di alihkan dalam bentuk kegiatan yang lain, serta adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas.

Keberhasilan pencapaian sasaran 4 tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesbang Pol dan Linmas
2. Kegiatan KOMINDA
3. Kegiatan FGD Analisi Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan.
4. Kegiatan Pengawasan Orang Asing
5. Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah
6. Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusifitas Daerah di Prov. Jateng
7. Kegiatan Pembinaan Sosial Politik
8. Kegiatan Pengkajian dan Pemantauan Dampak Perekonomian
9. Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah

10. Kegiatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama Antar Daerah Kab/Kota dan Daerah Perbatasan Dalam Rangka Peningkatan Keamanan
11. Kegiatan Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik
12. Kegiatan Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi
13. Kegiatan Peningkatan Demokratisasi dan HAM Bagi Kesejahteraan Masyarakat
14. Kegiatan Peningkatan Ideologi Negara Dalam Berbagai Kehidupan
15. Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
16. Kegiatan Penguatan Nilai-Nilai Sejarah dan Kebangsaan
17. Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal
18. Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme
19. Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial
20. Kegiatan Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi
21. Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN
22. Kegiatan Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
23. Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Amanat Inpres No.2 Tahun 2013)

**i. Sasaran 5.1** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah	70%	70%	100%	70%	100%
	2. Terlaksananya SOP dan SPM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat	70%	70%	100%	70%	100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dapat dicapai telah sesuai dengan target.

Capaian kinerja pada sasaran 5.1, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2014 mampu menyamai tahun 2013. Hal ini disebabkan karena

Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 menetapkan target atau kondisi eksisting sesuai dengan hasil evaluasi akhir Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

**j. Sasaran 5.2 : Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Linmas/Ratih Dalam Menjalankan Tugas**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Linmas/Ratih Dalam Menjalankan Tugas	1. Rasio Jumlah Ratih/Linmas dengan penduduk	1:100	1:300	30%	30%	100%

Capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Linmas/Ratih Dalam Menjalankan Tugas blm dapat di capai secara maksimal disebabkan antara lain :

1. Rendahnya anggaran pengadaan dan pelatihan Linmas/Ratih kab/kota di Jawa Tengah
2. Turunnya minat anggota masyarakat untuk menjadi anggota Linmas/Ratih.



3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan anggota satlinmas

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain :

1. Peningkatan kemampuan anggota satlinmas
2. Peningkatan keterlibatan anggota satlinmas dalam setiap kegiatan kemasyarakatan
3. Peningkatan anggaran pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota satlinmas

Capaian kinerja pada sasaran 5.2, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2014 mampu menyamai tahun 2013. Hal ini di sebabkan karena Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 menetapkan target atau kondisi eksisting sesuai dengan hasil evaluasi akhir Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

**k. Sasaran 5.3** : Meningkatnya Sinergitas Lembaga Dengan Berbagai Pihak Terkait Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Meningkatnya Sinergitas Lembaga Dengan Berbagai Pihak Terkait Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1. Terjalannya dengan berbagai pihak atau stakeholder terkait pemecahan masalah-masalah strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat	70%	70%	100%	70%	100%
--	--	-----	-----	------	-----	------

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dapat dicapai telah sesuai dengan target.

Capaian kinerja pada sasaran 5.3, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2014 mampu menyamai tahun 2013. Hal ini di sebabkan karena Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 menetapkan target atau kondisi eksisting sesuai dengan hasil evaluasi akhir Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 5.1, 5.2, 5.3, adalah sebesar Rp. 12.574.980.950 atau 95,02% dari total pagu

sebesar Rp. 13.234.600.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,98% dari Pagu yang ditentukan..

Keberhasilan pencapaian sasaran 5 tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas
3. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Pam Lingkungan bagi Komandan Satlinmas
4. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Penyelamatan di Air
5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas
6. Kegiatan Penguatan Kesadaran Bela Negara
7. Kegiatan Peningkatan Keterampilan PAM Swakarsa
8. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Satlinmas
9. Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas Dalam Pengamanan
10. Kegiatan Peningkatan Keterampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas
11. Kegiatan Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu
12. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan
13. Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah

## **B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Prov.Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2014, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 54.784.171.000, Anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Jawa. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai Sebesar Rp. 24.103.944.000
2. Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp. 29.729.537.000
3. Belanja Modal Sebesar Rp. 950.690.000

Penggunaan anggaran tersebut apabila di rinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

No	Program/Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Ket.
		( Rp )	( Rp )	Fisik (%)	Keu. (%)	
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2,205,676,000</b>	<b>1,922,741,085</b>	<b>100.00</b>	<b>87.17</b>	
1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	6,760,000	6,760,000	100.00	100.00	
2	Keg. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	546,000,000	463,459,220	100.00	84.88	Penggunaan Anggaran sesuai kebutuhan
3	Kegiatan jaminan barang milik daerah	75,000,000	74,871,725	100.00	99.83	Penggunaan Anggaran sesuai kebutuhan
4	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	216,042,000	208,371,900	100.00	96.45	Penggunaan Anggaran sesuai kebutuhan
5	Kegiatan Penyediaan barang cetak dan pengadaan	114,600,000	96,822,500	100.00	84.49	Penggunaan Anggaran sesuai kebutuhan
6	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	
	bangunan kantor					
7	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	35,835,000	35,069,075	100.00	97.86	Efisiensi Anggaran
8	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan	29,000,000	28,250,000	100.00	97.41	Efisiensi Anggaran

		perundang-undangan					
	9	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	96,000,000	61,011,400	100.00	63.55	Penggunaan Anggaran sesuai kebutuhan
	10	Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	540,000,000	431,005,265	100.00	79.82	Penggunaan Anggaran sesuai kebutuhan
	11	Kegiatan penyediaan Jasa pelayanan perkantoran	541,439,000	512,120,000	100.00	94.58	Penggunaan Anggaran sesuai kebutuhan
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>2,826,953,000</b>	<b>2,792,570,260</b>	<b>100.00</b>	<b>98.78</b>	
	1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	514,000,000	496,292,000	100.00	96.55	Efisiensi Anggaran
	2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	907,000,000	905,038,000	100.00	99.78	Efisiensi Anggaran
	3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	715,853,000	707,639,500	100.00	98.85	Efisiensi Anggaran
	4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00	

	5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kantor dan rumah tangga	200,000,000	199,438,760	100.00	99.72	Efisiensi Anggaran
	6	Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi	35,000,000	34,987,000	100.00	99.96	Efisiensi Anggaran
	7	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kantor	430,100,000	424,175,000	100.00	98.62	Efisiensi Anggaran
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>102,572,000</b>	<b>100,230,750</b>	<b>100.00</b>	<b>97.72</b>	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	102,572,000	100,230,750	100.00	97.72	Efisiensi Anggaran
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya</b>		<b>670,875,000</b>	<b>625,159,903</b>	<b>100.00</b>	<b>93.19</b>	
	<b>Aparatur</b>						
	1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	55,000,000	52,088,363	100.00	94.71	Penggunaan Anggaran sesuai kebutuhan
	2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	277,325,000	256,011,000	100.00	92.31	Sisa anggaran perjalanan dinas
	3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	338,550,000	317,060,540	100.00	93.65	Sisa anggaran belanja makan dan minum

<b>V</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal dan Informal</b>		<b>2,000,000,000</b>	<b>1,861,247,500</b>	<b>100.00</b>	<b>93.06</b>	
	1	Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	2,000,000,000	1,861,247,500	100.00	93.06	Sisa anggaran belanja makan dan minum & Perjalanan dinas
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>		<b>8,382,030,000</b>	<b>7,491,810,780</b>	<b>100.00</b>	<b>89.38</b>	
	1	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Bidang KesbangPol dan Linmas	2,690,000,000	2,255,891,000	100.00	83.86	Sisa anggaran upah tenaga kerja dan perjalanan dinas
	2	Kegiatan KOMINDA	322,040,000	55,407,500	21.43	17.21	Berdasarkan Radiogram Mendagri Nomor



						T.188.34/1823.D.II. Tanggal 20 Mei 2014
						Struktur Kominda sementara dibekukan dan agar
						dialihkan dalam bentuk kegiatan lain
3	Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik,Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan	281,785,000	255,630,000	100.00	90.72	Sisa anggaran belanja perjalanan dinas
4	Kegiatan Pengawasan orang asing	201,275,000	193,510,000	100.00	96.14	Efisiensi Anggaran
5	Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah	322,040,000	304,455,000	100.00	94.54	Sisa anggaran belanja perjalanan dinas
6	Kegiatan koordinasi penciptaan kondusivitas daerah di Prov. Jateng	166,000,000	147,950,000	100.00	89.13	Sisa anggaran belanja perjalanan dinas
7	Kegiatan Pembinaan Sosial Politik	550,000,000	542,975,000	100.00	98.72	Efisiensi Anggaran
8	Kegiatan Pengkajian dan Pemantauan Dampak Perekonomian	281,785,000	281,745,000	100.00	99.99	Efisiensi Anggaran
9	Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-masalah Strategis Daerah	281,785,000	263,263,280	100.00	93.43	Sisa anggaran belanja perjalanan dinas
10	Kegiatan Koordinasi & Pemantapan Kerjasama	322,040,000	320,344,000	100.00	99.47	Efisiensi Anggaran

	antar Daerah kab/kota & Daerah Perbatasan dalam					
	Rangka Peningkatan Keamanan					
11	Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik	241,530,000	227,842,000	100.00	94.33	Sisa anggaran belanja perjalanan dinas
12	Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi	426,500,000	417,350,000	100.00	97.85	Efisiensi Anggaran
13	Peningkatan Demokratisasi dan HAM bagi Kesejahteraan Rakyat	186,750,000	186,750,000	100.00	100.00	
14	Peningkatan Ideologi Negara dalam berbagai Kehidupan	191,000,000	181,953,000	100.00	95.26	Efisiensi Anggaran
15	Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme	166,000,000	156,710,000	100.00	94.40	Sisa anggaran belanja perjalanan dinas
16	Kegiatan Penguatan Nilai-nilai Sejarah dan Kebangsaan	197,500,000	184,660,000	100.00	93.50	Sisa anggaran belanja makan dan minum & Perjalanan dinas
17	Peningkatan Ketahanan Ekonomi berbasis kearifan lokal	457,500,000	457,500,000	100.00	100.00	
18	Kegiatan peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini bagi pemuda dan pelajar terhadap potensi terorisme dan radikalisme	197,500,000	197,500,000	100.00	100.00	
19	Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial					Sisa anggaran belanja

			83,000,000	69,328,000	100.00	83.53	perjalanan dinas
	20	Kegiatan Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi	166,000,000	166,000,000	100.00	100.00	
	21	Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN	250,000,000	250,000,000	100.00	100.00	
	22	Kegiatan Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran	150,000,000	150,000,000	100.00	100.00	
		Gelap Narkoba (P4GN)					
	23	Kegiatan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum	250,000,000	225,047,000	100.00	90.02	Sisa anggaran uang transport
		(Amanat inpres 2 tahun 2013)					
<b>VII</b>		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>3,738,730,000</b>	<b>3,658,221,300</b>	<b>100.00</b>	<b>97.85</b>	
	1	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	317,000,000	315,850,000	100.00	99.64	Efisiensi anggaran
	2	Kegiatan Peningkatan pemahaman Ideologi Negara	269,750,000	269,200,000	100.00	99.80	Efisiensi anggaran

3	Kegiatan Peningkatan Penanganan Ideologi & Monitoring Data perkembangan faham lain	265,500,000	257,470,300	100.00	96.98	Efisiensi anggaran
4	Kegiatan Penguatan Rekonsiliasi elemen Masyarakat Dalam kerangka Peningkatan Wasbang	239,000,000	238,725,000	100.00	99.88	Efisiensi anggaran
5	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Seni serta Budaya Daerah	469,750,000	469,750,000	100.00	100.00	
6	Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat kepercayaan	374,000,000	374,000,000	100.00	100.00	
7	Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat Serta Akulturasi Budaya	224,000,000	224,000,000	100.00	100.00	
8	Kegiatan Pengkajian Penanganan Masalah sosial Kemasyarakatan	249,000,000	248,710,000	100.00	99.88	Efisiensi anggaran
9	Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis	334,730,000	299,965,000	100.00	89.61	Sisa anggaran belanja uang transport & Perjalanan dinas
10	Kegiatan Pemasarakatan dan Revitalisasi Nilai - nilai					Efisiensi anggaran

		249,000,000	248,620,000	100.00	99.85	
	Pancasila bagi kalangan PTN/PTS dan Pendidik					
11	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah	166,000,000	164,050,000	100.00	98.83	Efisiensi anggaran
	Perjuangan Bangsa					
12	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pilar Kebangsaan	166,000,000	165,665,000	100.00	99.80	Efisiensi anggaran
13	Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan PPWK	166,000,000	135,716,000	100.00	81.76	Sisa anggaran honorarium panitia kegiatan
	(Amanat Permendagri 72/2012)					
14	Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Perempuan	124,500,000	122,000,000	100.00	97.99	Efisiensi anggaran
15	Kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda	124,500,000	124,500,000	100.00	100.00	
<b>VIII</b>	<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>1,459,000,000</b>	<b>1,433,018,600</b>	<b>100.00</b>	<b>98.22</b>	
1	Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai	166,000,000	151,100,000	100.00	91.02	Sisa anggaran belanja perjalanan dinas

		Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah					
	2	Kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila	239,000,000	238,587,500	100.00	99.83	Efisiensi anggaran
		Bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat					
	3	Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan	399,000,000	399,000,000	100.00	100.00	
	4	Pemeliharaan Hubungan Etnisitas dengan Negara	207,500,000	207,500,000	100.00	100.00	
	5	Kegiatan Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam	447,500,000	436,831,100	100.00	97.62	Efisiensi anggaran
		Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara					
		Bagi Pemuda dan Pelajar					
IX	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk</b>		<b>3,279,500,000</b>	<b>3,111,196,427</b>	<b>100.00</b>	<b>94.87</b>	
	<b>Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>						
	1	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan FKDM	290,500,000	288,072,427	100.00	99.16	Efisiensi anggaran
	2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	249,000,000	248,124,000	100.00	99.65	Efisiensi anggaran
		Sipil dalam Penyelesaian konflik Sosial					
	3	Kegiatan Penguatan Ruang Publik bagi Pencegahan					Sisa anggaran upah

		dan penyelesaian	2,740,000,000	2,575,000,000	100.00	93.98	tenaga kerja
		Konflik dalam rangka ketahanan masyarakat					
<b>X</b>	<b>Program Peningkatan Pendidikan Politik</b>		<b>3,746,000,000</b>	<b>3,575,305,180</b>	<b>100.00</b>	<b>95.44</b>	
	<b>Masyarakat</b>						
	1	Kegiatan Peningkatan dan Penguatan peran Politik	358,500,000	347,785,000	100.00	97.01	Efisiensi Anggaran
		Ormas /LSM dan Toma /Toga					
	2	Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan	498,000,000	480,668,420	100.00	96.52	Efisiensi Anggaran
		Politik Pemerintahan					
	3	Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan	399,000,000	385,596,900	100.00	96.64	Efisiensi Anggaran
		Partai Politik					
	4	Kegiatan Pendidikan Politik bagi Elemen Masyarakat	572,500,000	568,778,100	100.00	99.35	Efisiensi Anggaran
	5	Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pilkada	207,500,000	202,011,810	100.00	97.36	Efisiensi Anggaran
	6	Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik	290,500,000	267,873,400	100.00	92.21	Sisa anggaran belanja perjalanan dinas
	7	Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak	449,000,000	437,532,550	100.00	97.45	Efisiensi Anggaran

		Politik PILKADA					
	8	Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah	249,000,000	248,985,000	100.00	99.99	Efisiensi Anggaran
	9	Penguatan Pendidikan Politik bagi Masyarakat	307,000,000	287,919,000	100.00	93.78	Sisa anggaran belanja perjalanan dinas
	10	Kegiatan Pendidikan Politik bagi perempuan	166,000,000	123,270,000	100.00	74.26	Sisa anggaran belanja perjalanan dinas
	11	Kegiatan Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat	249,000,000	224,885,000	100.00	90.32	Sisa anggaran belanja perjalanan dinas
<b>XI</b>		<b>Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat dan Rakyat Terlatih</b>					
			<b>13,234,600,000</b>	<b>12,574,980,950</b>	100.00	95.02	
	1	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Deteksi Dini Bagi Anggota	249,000,000	241,720,000	100.00	97.08	Efisiensi Anggaran
		Linmas					
	2	Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas	332,000,000	331,912,500	100.00	99.97	Efisiensi Anggaran
		Se Jateng					
	3	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pam lingkungan	300,000,000	277,400,000	100.00	92.47	Sisa anggaran belanja perjalanan dinas
		Bagi Komandan Satlinmas					
	4	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Penyelamatan					Sisa anggaran belanja



		589,100,000	482,070,000	100.00	81.83	perjalanan dinas
	Di Air					
5	Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pemberdayaan	207,500,000	189,795,000	100.00	91.47	Sisa anggaran belanja perjalanan dinas
	Satlinmas					
6	Kegiatan Penguatan Kesadaran Bela Negara	83,000,000	82,820,000	100.00	99.78	Efisiensi Anggaran
6	Kegiatan Peningkatan Keterampilan Pengamanan Swakarsa	249,000,000	239,250,000	100.00	96.08	Efisiensi Anggaran
7	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Satlinmas	2,000,000,000	1,989,564,000	100.00	99.48	Efisiensi Anggaran
8	Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan	6,225,000,000	5,801,490,550	100.00	93.20	Sisa anggaran belanja perjalanan dinas
9	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan PAM daerah Rawan Kantibmas	365,000,000	350,945,000	100.00	96.15	Efisiensi Anggaran
10	Kegiatan Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu	365,000,000	355,111,000	100.00	97.29	Efisiensi Anggaran
11	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan	1,270,000,000	1,236,107,500	100.00	97.33	Efisiensi Anggaran
12	Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah	1,000,000,000	996,795,400	100.00	99.68	Efisiensi Anggaran

XII	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		249,000,000	246,787,000	100.00	99.11	
	1	Kegiatan Sinkronisasi Kesbangpol dan Linmas	249,000,000	246,787,000	100.00	99.11	Efisiensi Anggaran

Berdasarkan Laporan Realisasi Keuangan diatas terlihat bahwa Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah pada TA. 2014 dengan total anggaran APBD sebesar Rp. 54.784.171.000, dapat melakukan efisiensi sebesar 7,54% atau Rp. 4.125.270.080. total realisasi anggaran pada tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013 yang sebesar 75,01%, di sebabkan pada TA. 2013 terdapat pengembalian dana anggaran Pengamanan Pilgub 2013.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Tinjauan Umum Keberhasilan**

Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2014 dengan kategori BAIK, Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang berada pada nilai 100%.

Efisiensi anggaran dari kegiatan yang ada pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 adalah sebesar 7,54%, atau senilai Rp. 4.125.270.080. Hal tersebut menunjukkan adanya tingkat penggunaan anggaran yang tertib dengan melaksanakan asas manfaat.

#### **B. Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya terdapat satu kegiatan yang tidak dapat intelijen daerah (KOMINDA) dengan anggaran Rp. 322.040.000,- capaian realisasi keuangan 17,21% dan realisasi fisik (21,43%).

Hal ini disebabkan berdasarkan radiogram Mendagri Nomor T.188.34 / 1823. D.II tanggal 30 Mei 2014 bahwa struktur KOMINDA yang diatur sesuai Permendagri Nomor 16 Th 2011 sementara dibekukan sehingga untuk Badan Kesbang Pol Provinsi yang memiliki perencanaan dan anggaran kegiatan KOMINDA dalam APBD Tahun 2014 agar dialihkan dalam bentuk kegiatan lain sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007

### **C. Strategi Pemecahan Masalah**

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut dengan mengoptimalkan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta forum yang ada FPBI, FKUB, FKDM, dan KOMINDA untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat guna terciptanya situasi daerah yang kondusif. Disamping itu mendidik para kader agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat disekitarnya dibidang Ipoleksosbud.

Demikian laporan Instansi Kinerja Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk penyusunan kegiatan / kinerja pada masa mendatang.

**Semarang,**

**KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**19591202 198203 1 005**

**Kata Pengantar**

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah. LKj Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKj IP adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, ..... Februari 2015

**KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS  
PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP 19591202 198203 1 005